



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

ManadoPost.id

Rabu, 16 April 2025

LKPD Pemkab Minut Mulai Dikuliti BPK, Didorong Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan, Begini Respon Bupati Joune Ganda



MANADOPOST.ID—Proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 resmi dimulai. Entry meeting yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Selasa (15/4/2024) ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pertemuan yang berlangsung secara virtual itu diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Agenda ini tidak hanya menjadi forum koordinasi awal pemeriksaan, tetapi juga wadah konsolidasi langkah-langkah guna memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, yang turut hadir secara daring, menekankan pentingnya agenda ini sebagai instrumen pengawasan yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola keuangan daerah. Ia menyebut bahwa pertemuan ini membahas berbagai strategi koordinatif agar pemeriksaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip good governance.

“Koordinasi seperti ini sangat penting untuk memastikan semua pihak berjalan dalam koridor yang sama. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan publik,” ujar Joune dalam sambutannya.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Lebih jauh, partisipasi aktif kepala daerah dalam forum ini dinilai sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sendiri menyatakan siap mendukung sepenuhnya seluruh proses pemeriksaan, dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi BPK untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran daerah.